

**Unit Eselon I Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan
Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nusa Tenggara
Timur**

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022



Jl W.J Lalamentik No.98

Kupang – NTT 85111

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, khusus Direktorat Jenderal Pemasaryakatan adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, khusus Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khusus Drektorat Jenderal Pemasaryakatan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Kupang 31 Juli 2022
Kepala Kantor Wilayah

Marciana D. Jone, SH
NIP. 19641126 199103 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	79
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	94
F. Pengungkapan Penting Lainnya	99
VI. Lampiran dan Daftar	100



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
Jalan W.J. Lalamentik No. 98 Kupang,
Telepon: (0380) 831101- 821077-825910 , Fax (0380) 821126
Kode Pos: 85111, Email; kanwil.ntt@kemenkumham.go.id
Web site : <http://kanwilntt.kemenkumham.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT , khusus Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I TA 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Kupang, 31 Juli 2022

Kepala Kantor Wilayah

Marciana D. Jone, SH

NIP. 19641126 199103 2 001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khusus Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp112.274.966,00 atau mencapai 110 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp102,070,00,00

Realisasi Belanja Negara Semester I pada TA 2022 adalah sebesar Rp56.740.663.667,00 atau mencapai 48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp119.260.226,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022.

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.822.448.601.730,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.730.985.953,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.818.409576,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp308.039.226,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11.557.712.804,00 dan Rp1.810.890.888.926,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp121.487.696,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp72.650.211.007,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(72.528.723.311,00). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(103.074.151,00) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(72.631.797.462,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp1.829.405.304.862,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(72.631.797.462,00) kemudian ditambah dengan koreksi nilai asset non revaluasi senilai Rp26.359.358,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp54.143.740.864,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp1.810.890,888.926,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022		% thd Angg	30 JUNI 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	102.070.000	112.274.966	110	268.978.823
JUMLAH PENDAPATAN		102.070.000	112.274.966	110	268.978.823
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	61.295.360.000	32.056.538.119	52	34.551.865.330
Belanja Barang	B.4	56.114.866.000	23.779.266.548	42	21.630.523.357
Belanja Modal	B.5	1.850.000.000	904.859.000	49	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		119.260.226.000	56.740.663.667	48	56.182.388.687

I. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT 30 JUNI 2022 Dan 31 DESEMBER 2021 (DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	751.547.169	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	18.355.810	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	6.575.291	80.708.226
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	(403.541)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan		2.954.622.523	3.895.865.503
Persediaan yang Belum Diregister	C.10	(114.840)	-
Jumlah Aset Lancar		3.730.985.953	3.976.170.188
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	1.706.838.670.000	1.708.725.243.000
Peralatan dan Mesin	C.15	58.266.410.537	57.553.422.037
Gedung dan Bangunan	C.16	180.518.986.531	180.805.963.531
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	966.619.099	964.119.099
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	741.392.940	741.392.940
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(128.922.502.556)	(122.911.624.521)
Jumlah Aset Tetap		1.818.409.576.551	1.825.878.516.086
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	8.296.094.814	8.472.687.814
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(7.988.055.588)	(8.120.951.919)
Jumlah Aset Lainnya		308.039.226	351.735.895
JUMLAH ASET		1.822.448.601.730	1.830.206.422.169
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	751.547.169	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	8.288.934.815	784.331.938
Utang Yang belum ditagihkan	C.26	2.212.223.843	-
Hibah Yang belum disahkan	C.27	300.000.000	16.785.369
utang jangka pendek lainnya	C.28	5.006.977	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		11.557.712.804	801.117.307
JUMLAH KEWAJIBAN		11.557.712.804	801.117.307
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar	C.29	-	-
Ekuitas Dana Investasi	C.30	-	-
Ekuitas	C.31	1.810.890.888.926	1.829.405.304.862
JUMLAH EKUITAS DANA		1.810.890.888.926	1.829.405.304.862
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.822.448.601.730	1.830.206.422.169

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAAPORAN OPERASIONALUK PERIODE BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022	31 DESEMBER 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	121.487.696	149.249.640
JUMLAH PENDAPATAN		121.487.696	149.249.640
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	39.773.238.127	34.551.145.120
Beban Persediaan	D.3	2.371.341.946	2.383.703.874
Beban Barang dan Jasa	D.4	19.039.173.899	14.923.682.942
Beban Pemeliharaan	D.5	3.860.179.117	3.584.222.224
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.535.527.785	1.250.296.270
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	500.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	6.070.653.674	7.064.063.691
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	(403.541)	(701.201)
JUMLAH BEBAN		72.650.211.007	63.756.412.920
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(72.528.723.311)	(63.607.163.280)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	1.921.111
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	36.463.855	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		(36.463.855)	1.921.111
Pendapatan dari Aset Non Operasional Lainnya	D.13	1.302.439.704	300.001
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		1.369.050.000	-
SURPLUS/DEFISIT S DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(103.074.151)	2.221.112
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
POS LUAR BIASA	D.14		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(72.631.797.462)	(63.604.942.168)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021
EKUITAS AWAL	E.1	1.829.405.304.862	1.874.319.541.416
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(72.631.797.462)	(63.604.942.168)
PENYESUAIN NILAI TAHUN BERJALAN	E.3	-	-
PENYESUAIN NILAI ASET	E.4	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI ATAS REKALSIFIKASI	E.5	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.6	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	(26.359.338)	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.8	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.9	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN -- HIBAH MASUK/KELUAR	E.10	-	8.215.810
Jumlah Lain-Lain		(26.359.338)	8.215.810
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.11	54.143.740.864	57.199.810.199
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	E.12	(18.514.415.936)	(6.396.916.159)
EKUITAS AKHIR	E.13	1.810.890.888.926	1.867.922.625.257

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

*DasarHuku
mEntitas
dan
RencanaStra
tegis*

Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT didirikan dengan tujuan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi mewujudkan tujuan diatas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT berkomitmen dengan visi “masyarakat Nusa Tenggara Timur memperoleh kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT melalukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- Menyelenggarakan peningkatan kompetensi aparatur hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menyelenggarakan tertib administrasi.
- Menyelenggarakan pelayanan dan penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual.

- Menyelenggarakan penyuluhan hukum dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Akuntansi Istimewa Papua. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Istimewa Papua adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas

diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan -LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung	100%

	sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1

tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada tahun 2019 dan 2019, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa

Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/ Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara Yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada Tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2019 dan 2019 terdapat perbaikan / koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun,

apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau

usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan denganberpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor :620/KM.6/2015

tentang maa manfaat dalam rangka amortisasi barang mulik negara berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintah pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri,Rahasia Dagang, Desain tata letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta karya Seni Terapan Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta ats Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak ekonomi Prosuder Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal namun tidak mengubah pagu anggaran (Pagu Tetap). Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja prioritas dalam rangka pelaksanaan rencana kerja nyata pemerintahan dimana adanya Pandemic Covid 19 dan adanya automatic adjustment (pencadangan sementara/ pagu bintang) sehingga pembelanjaan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	102.070.000	102.070.000
Jumlah Pendapatan	102.070.000	102.070.000
Belanja		
Belanja Pegawai	61.295.360.000	61.295.360.000
Belanja Barang	56.114.866.000	56.114.866.000
Belanja Bantuan Sosial	0	1.850.000.000
Belanja Modal	1.850.000.000	-
Jumlah Belanja	119.260.226.000	119.260.226.000

B.1 Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Rp268.978.
823,00*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp112.274.966,00 atau mencapai 110 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp102.070.000,00 Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain.

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119) merupakan pendapatan atas penjualan hasil karya narapidana ataupun atas penjualan pemanfaatan sumber daya yang ada pada satker yang melibatkan narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dananya bersumber dari DIPA satker seperti penjualan hasil budidaya lele, ikan nila, hasil perkebunan dsb;
2. Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang ditinggali oleh PNS(Akun 425131);
3. Pendapatan pelayanan dan administrasi Hukum lainnya(Akun 425219) merupakan pendapatan dari kegiatan kemandirian, bimbingan kerja dan kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dibiayai oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama;
4. Pendapatan dari penerimaan Kembali belanja pegawai, barang dan modal tahun anggaran yang lalu (akun 425911,425912,dan akun 425913).
5. Pendapatan Lain-Lain (425999)

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

MAP	Uraian	2022	
		Anggaran	Realisasi
425119	Pendapatan Penjualan Hasil non litbang lainnya	-	5.582.600
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		-
425129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya		-
425131	Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan	102.070.000	63.906.486
425219	Pendapatan Pelayanan dan administrasi hukum lainnya		25.747.850
425699	Pendapatan Jasa Lainnya		-
425911	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL		6.295.481
425912	Penerimaan kembali belanja barang TAYL		7.852.449
425913	Penerimaan kembali belanja modal TAYL		-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		2.890.100
	Jumlah	102.070.000	112.274.966

Realisasi Pendapatan 30 Juni 2022 diatas estimasi pendapatan disebabkan oleh pendapatan pengelolaan BMN berupa pendapatan penjualan hasil non litbang lainnya, Pendapatan sewa rumah tanah,gedung dan bangunan Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum lainnya, Pendapatan Jasa Lainnya, Penerimaan kembali belanja Tahun anggaran yang lalu Selanjutnya, realisasi pendapatan per 30 Juni 2022 mengalami penurunan 139 persen dibandingkan 30 Juni 2021.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan 30 Juni 2022
dan 30 Juni 2021*

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2022	30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Giro		-	0,00
Pendapatan PNPB	112.274.966	268.978.823	-139,57%
Jumlah	112.274.966	268.978.823	-139,57%

B.2 Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp56.740
663.667,00*

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp56.740.663.667,00 atau 48% dari anggaran belanja sebesar Rp119.260.226.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni
2022*

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	61.295.360.000	32.056.538.119	52,30
Belanja Barang	56.114.866.000	23.779.266.548	42,38
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	1.850.000.000	904.859.000	48,91
Total Belanja Kotor	119.260.226.000	56.740.663.667	47,58
Pengembalian		-	0,00
Jumlah	119.260.226.000	56.740.663.667	47,58

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,99% dibandingkan 30 Juni 2021. Hal ini disebabkan adanya belanja modal yang membuat realisasi belanja modal tinggi.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2022	REALISASI 30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	32.056.538.119	34.551.145.120	(7,22)
Belanja Barang	23.779.266.548	21.630.523.357	9,93
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	904.859.000	-	#DIV/0!
Jumlah	56.740.663.667	56.181.668.477	0,99

*Belanja
Pegawai
Rp34.551.8
65.330,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp32.056.538.119,00 dan Rp34.551.865.330,00. Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2021 mengalami penurunan 7.22% dibandingkan 30 Juni 2021, karena adanya pengurangan jumlah pegawai karena pensiun.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Perbandingan Belanja Pegawai 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2022	REALISASI 30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	32.025.871.962	34.551.145.120	(7,31)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	32.828.000	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	32.058.699.962	34.551.145.120	(7,21)
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.161.843)	-	-
Jumlah Belanja	32.056.538.119	34.551.145.120	(7,22)

Pada Tabel di atas terdapat pengembalian belanja pegawai dengan jumlah Rp2.161.843,00 yang disebabkan:

Terdapat pengembalian belanja pembulatan gaji PNS, dan Pengembalian belanja tunjangan umum PNS.

*Belanja
Barang
Rp23.779.2
66.548,00*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 dan per 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp23.779.266.548,00 dan Rp21.630.523.357,00. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2022 mengalami Kenaikan 10 persen dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2021.

Hal ini antara lain disebabkan oleh karena adanya kenaikan belanja operasional, belanja non operasional, belanja persediaan dan belanja perjalanan biasa.

Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2022	REALISASI 30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	14.148.125.153	12.342.984.276	15
Belanja Barang Non Operasional	2.029.588.587	1.843.500.798	10
Belanja barang Persediaan	1.608.186.480	1.797.008.957	-
Belanja Jasa	890.467.972	812.600.832	10
Belanja Pemeliharaan	3.613.311.261	3.584.222.224	1
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.489.587.095	1.250.296.270	19
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	23.779.266.548	21.630.613.357	10
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	23.779.266.548	21.630.613.357	10

Rincian Tabel Belanja Barang Operasional

MAK	Uraian	Realiasi
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.877.531.357
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	10.977.644.714
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	365.676.225
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	20.163.654
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	553.830.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	276.725.990
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	83.553.213
Jumlah Belanja Barang Operasional		14.148.125.153

Rincian Tabel belanja Barang Non Operasional

MAK	Uraian	Realiasi
521211	Belanja Bahan	1.235.796.933
521213	Belanja Honor output Kegiatan	74.650.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	566.066.859
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	153.074.795
Jumlah Belanja Barang Non Operasional		2.029.588.587

Rincian Tabel belanja Barang Persediaan

MAK	Uraian	Realiasi
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.515.725.020
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	0
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	92.576.300
Jumlah Belanja Barang Persediaan		1.608.301.300

Rincian Tabel belanja Jasa

MAK	Uraian	Realiasi
522111	Belanja Langganan Listrik	439.926.507
522112	Belanja Langganan Telpon	104.259.535
522113	Belanja Langganan Air	152.761.930
522141	Belanja Sewa	87.600.000
522151	Belanja Jasa Profesi	83.140.000
522192	Belanja Jasa lainny	22.780.000
Jumlah Belanja Jasa		890.467.972

Rincian Belanja Pemeliharaan

MAK	Uraian	Realiasi
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.548.496.749
523112	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.064.814.512
Jumlah Belanja Pemeliharaan		3.613.311.261

Rincian Belanja Perjalanan Dinas

MAK	Uraian	Realiasi
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.248.512.095
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	241.075.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0
Jumlah Belanja Perjalanan Dalam Negeri		1.489.587.095

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp904.859.000,00

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp904.859.000,00 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2021 mengalami kenaikan 100% karena belanja modal pada tahun 2021 tidak ada anggaranya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2022	REALISASI 30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	754.859.000	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	904.859.000	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	0
Jumlah Belanja	904.859.000	0	#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut tidak mengalami

kenaikan/ penurunan sebesar 00.00 persen dibandingkan 30 Juni 2022. Hal ini disebabkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT tidak mendapat alokasi anggaran untuk belanja modal tanah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp754.859.000,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp754.859.000,00

Perbandingan Realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

Nama UPT	Pagu	Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2022
BAPAS KELAS II KUPANG	100.000.000	-
LAPAS KELAS IIA KUPANG	0	-
LAPAS KELAS IIB ATAMBUA	100.000.000	-
RUTAN KELAS IIB KEFAMENANU	100.000.000	48.000.500
LAPAS KELAS III BAA	100.000.000	32.538.000
RUTAN KELAS IIB SOE	100.000.000	47.000.000
LAPAS KELAS IIB KALABAHI	100.000.000	52.000.000
LAPAS KELAS IIA WAINGAPU	100.000.000	40.000.000
LAPAS KELAS IIB WAIKABUBAK	100.000.000	18.000.000
LAPAS KELAS IIB ENDE	100.000.000	99.750.000
RUTAN KELAS IIB BAJAWA	100.000.000	73.870.500
RUTAN KELAS IIB RUTENG	100.000.000	-
RUTAN KELAS IIB MAUMERE	100.000.000	43.500.000
RUTAN KELAS IIB LARANTUKA	100.000.000	99.900.000
DIVISI PEMASYARAKATAN	0	-
LPKA KELAS I KUPANG	100.000.000	99.800.000
RUPBASAN KELAS I KUPANG	100.000.000	84.000.000
LAPAS TERBUKA KELAS IIB WAIKABUBAK	0	-
BAPAS KELAS II WAIKABUBAK	100.000.000	16.500.000
LAPAS KELAS III LEMBATA	100.000.000	-
LAPAS KELAS III LEMBATA	0	-
LAPAS KELAS III LEMBATA	0	-
JUMLAH	1.700.000.000	754.859.000

Belanja modal gedung dan bangunan Rp150.000.000,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp150.000.000 dan Rp0.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja Modal 30 Juni 2022 tidak mengalami Kenaikan/ hal ini disebabkan ada alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 30 Juni 2022	REALISASI 30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
gedung dan bangunan	150.000.000	0	100
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0
Jumlah Belanja	150.000.000	0	100

Realisasi belanja modal Gedung bangunan terdapat pada Rutan Maumere karena adanya perbaikan jaringan listrik yang menambah nilai Gedung dan bangunan pada asset.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp751.547.1
69,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp751.547.169,00 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2022	Tahun 2021
Kas Bendahara Pengeluaran	751.547.169	-
	-	-
Jumlah	751.547.169	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	30 Juni 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp18.355.81
0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp18.355.810 dan Rp0.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	30 Juni 2022	Tahun 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	18.355.810	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	18.355.810	-

Rincian kas lainnya dan setara kas merupakan kas lainnya dibendahara pengeluaran yang belum disetor atau dipertanggungjawabkan.

Rincian Kas lainnya dan setara kas sebagai berikut :

1. Rutan Kefa merupakan GU KKP yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp13.348.833.00;
2. Rutan Soe pajak belanja barang yang belum disetor sebesar Rp2.117.587.00;
3. Rutan Ruteng pajak belanja barang yang belum disetor sebesar Rp2.889.300,00.

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp6.575.291,00 dan Rp80.708.226,00.

*Piutang
PNBP
Rp6.575.291
,00*

Rincian Piutang PNB

Uraian	30 Juni 2022	Tahun 2021
Piutang PNB	6.575.291	80.708.226
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	6.575.291	80.708.226

Rincian Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang disebabkan oleh PNB Sewa rumah dinas pada SPM Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli Tahun 2022.

Rincian Piutang Bukan Pajak Sebagai Berikut :

NO	NAMA UPT	NILAI (RP)
1	BALAI PEMASYARAKATAN KUPANG	268.416,00
2	BALAI PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	98.524,00
3	LAPAS ATAMBUA	396.638,00
4	LAPAS KELAS III BAA	90.197,00
5	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	59.796,00
6	LPKA KELAS I KUPANG	289.188,00
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	422.548,00
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	213.134,00
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	79.915,00
10	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	387.805,00
11	LP TERBUKA WAIKABUBAK	609.934,00
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	1.240.000,00
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAINGAPU	498.360,00
14	RUPBASAN KUPANG	88.696,00
15	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	79.231,00
16	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	275.760,00
17	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	186.357,00
18	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	234.852,00
19	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	484.342,00
20	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	392.768,00
21	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	178.830,00
	JUMLAH	6.575.291,00

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 .

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 30 Juni 2022 dan 2021

No	Nama	30 Juni 2022	Tahun 2021
1		-	-
2		0	0
Jumlah		-	-

Bagian
Lancar TPA
Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	30 Juni 2022	TH 2021
1		-	-
Jumlah		-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp(403.541)

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	0,50%	-

C.8 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka Rp0

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	30 Juni 2022	Tahun 2021
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

Jenis	30 Juni 2022	Tahun 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

C.10 Persediaan

*Persediaan
Rp2.954.622
.523,00.*

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp2.954.622.523,00 dan Rp3.895.865.503,00. Saldo persediaan mengalami penurunan sebesar Rp941.242.980,00 karena pemakaian barang Persediaan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan

Nb	Uraian	31-Dec-21	30-Jun-22	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Barang Konsumsi	Rp 2,755,248,863	Rp 1,866,283,583	Rp (888,965,280)
2	Amunisi	Rp 1,046,688,940	Rp 1,046,138,940	Rp (550,000)
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	Rp 93,927,700	Rp 42,200,000	Rp (51,727,700)
4	Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pita, Cukai, Meterai dan Leges	Rp -	Rp -	Rp -
6	Tanah Bangunan untuk dijual kpd masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
7	Hewan & Tanaman untuk dijual kpd masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
8	Peralatan & Mesin untuk dijual kpd masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
9	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kpd masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
10	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kpd masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
11	Barang Persediaan Lainnya untuk dijual kpd masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
12	Bahan Baku	Rp -	Rp -	Rp -
13	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	Rp -	Rp -	Rp -
14	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	JUMLAH	Rp 3,895,865,503	Rp 2,954,622,523	Rp 941,242,980

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

**Perbandingan Nilai Persediaan Per Satuan Kerja
Periode 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2022**

No	Unit Pelaporan BMN	31-Dec-21	30-Jun-22	Kenaikan / (Penurunan)
1	Bapas Kupang	Rp 8,939,500	Rp 16,186,800	Rp 7,247,300
2	Lapas Kupang	Rp 582,363,716	Rp 545,699,732	Rp (36,663,984)
3	Lapas Atambua	Rp 152,693,340	Rp 125,567,340	Rp (27,126,000)
4	Rutan Kefamenanu	Rp 147,998,620	Rp 98,752,620	Rp (49,246,000)
5	Lapas Ba'a	Rp 87,123,020	Rp 87,123,020	Rp -
6	Rutan Soe	Rp 211,414,050	Rp 212,646,550	Rp 1,232,500
7	Lapas Kalabahi	Rp 271,969,745	Rp 191,889,645	Rp (80,080,100)
8	Lapas Waingapu	Rp 196,031,020	Rp 145,159,920	Rp (50,871,100)
9	Lapas Waikabubak	Rp 279,266,010	Rp 219,365,490	Rp (59,900,520)
10	Lapas Ende	Rp 213,789,630	Rp 143,411,240	Rp (70,378,390)
11	Rutan Bajawa	Rp 269,295,160	Rp 269,295,160	Rp -
12	Rutan Ruteng	Rp 231,796,399	Rp 146,751,250	Rp (85,045,149)
13	Rutan Maumere	Rp 323,864,223	Rp 323,864,223	Rp -
14	Rutan Larantuka	Rp 140,430,122	Rp 140,286,122	Rp (144,000)
15	Divisi PAS	Rp 652,000	Rp 652,000	Rp -
16	Lapas Anak	Rp 79,767,440	Rp -	Rp (79,767,440)
17	Rupbasan	Rp 305,000	Rp 1,030,000	Rp 725,000
18	LPT Waikabubak	Rp 111,981,038	Rp 81,213,177	Rp (30,767,861)
19	Bapas Waikabubak	Rp 297,500	Rp 1,014,000	Rp 716,500
20	Lapas Lembata	Rp 123,900,120	Rp 70,675,020	Rp (53,225,100)
21	Lapas Perempuan Kupang	Rp 88,212,120	Rp 4,624,500	Rp (83,587,620)
22	Rutan Kupang	Rp 373,775,730	Rp 129,414,714	Rp (244,361,016)
	JUMLAH	Rp 3,895,865,503	Rp 2,954,622,523	Rp 941,242,980

C.10.1 Persediaan Yang Belum Diregister

Persediaan yang belum diregister per tanggal 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp(114.840,00),- dan Rp0,-, merupakan pengembalian belanja barang kebutuhan sandang narapidana namun pada saat penginputan tetap menggunakan nilai yang belum dilakukan pengembalian belanja selanjutnya akan dibuatkan koreksi penginputan pada bulan berikutnya. Rincian Persediaan yang belum diregister sebagai berikut:

*Perbandingan Persediaan yang belum teregister 30 Juni
2022 dan 31 Desember 2021*

Jenis	30 Juni 2022	Tahun 2021
Persediaan yang belum diregister	(114.840)	-
	-	-
Jumlah	(114.840)	-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/
TGRRp0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

No	Debitur	30 Juni 2022	Tahun 2021
1		-	-
2		0	0
Jumlah		-	-

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	30 Juni 2022	TAHUN 2021
1		-	-
2		-	-
Jumlah		-	-

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang 30 Juni 2022*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,25%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-

C.14 Tanah

Tanah
Rp1.706.838
.670.000,00

Saldo Tanah Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2022 sebesar Rp1.706.838.670,00 jika dibandingkan dengan saldo tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.708.725.243.000,00 maka terdapat terdapat penurunan nilai tanah dari periode 31 Desember 2021 sebesar Rp1.886.573.000,00.

Tabel1

Perbandingan Nilai Aset Tanah Per Satuan Kerja
Periode 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2022

No	Unit Pelaporan BMN	31 Desember 2021 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Bapas Kupang	2.186.573.000	-	(2.186.573.000)
2	Lapas Kupang	1.316.900.004.000	1.316.900.004.000	-
3	Lapas Atambua	54.445.235.000	54.445.235.000	-
4	Rutan Kefa	44.953.461.000	44.953.461.000	-
5	Cab. Rutan Ba'a	10.275.294.000	10.275.294.000	-
6	Rutan Soe	8.417.116.000	8.417.116.000	-
7	Lapas Kalabahi	57.186.602.000	57.186.602.000	-
8	Lapas Waingapu	17.185.183.000	17.185.183.000	-
9	Lapas Waikabubak	17.306.073.000	17.306.073.000	-
10	Lapas Ende	70.932.860.000	70.932.860.000	-
11	Rutan Bajawa	34.658.440.000	34.658.440.000	-
12	Rutan Ruteng	29.082.553.000	29.082.553.000	-
13	Rutan Maumere	19.615.015.000	19.615.015.000	-
14	Rutan Larantuka	23.969.437.000	23.969.437.000	-
15	Divisi PAS	-	-	-
16	Lapas Anak	-	-	-
17	Rupbasan	-	-	-
18	LPT Waikabubak	1.524.063.000	1.524.063.000	-
19	Bapas Waikabubak	-	-	-
20	Lapas Lembata	87.334.000	387.334.000	300.000.000
21	Lapas Wanita Kupang	-	-	-
22	Rutan Kupang	-	-	-
J U M L A H		1.708.725.243.000	1.706.838.670.000	(1.886.573.000)

Rincian Mutasi Tambah

Terdapat mutasi atau perubahan nilai tanah berupa transfer masuk tanah yaitu tanah dari Pemerintahan Kabupaten Lembata sebesar Rp300.000.000,00 pada satker LP Lembata.

Rincian Kurang

Terdapat mutasi atau perubahan nilai tanah berupa transfer keluar tanah yaitu tanah dari Bapas Kupang sebesar Rp2.186.573.000,00 Ke Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Tanah pada Kementerian Hukum dan HAM RI per 30 Juni 2022 seluas 1.879.843 m², dengan rincian 1.857.240 m² sudah bersertifikat dan 22.603 m² belum bersertifikat.

Tabel 6
Rincian Luas Tanah Per Satuan Kerja
Yang Sudah Bersertifikat dan Yang Belum Bersertifikat

NO	KANTOR WILAYAH	LUAS TANAH (m ²)		LUAS SELURUHNYA (m ²)
		BERSERTIFIKAT	BLM SERTIFIKAT	
1	Bapas Kupang	-	-	-
2	Lapas Kupang	770.367	-	770.367
3	Lapas Atambua	149.708		149.708
4	Rutan Kefa	187.647		187.647
5	Rutan Soe	24.895	10.000	34.895
6	Cab. Rutan Ba'a	153.540	-	153.540
7	Lapas Kalabahi	46.264		46.264
8	Lapas Waingapu	52.340		52.340
9	Lapas Waikabubak	58.360		58.360
10	Lapas Ende	36.845		36.845
11	Rutan Bajawa	145.215		145.215
12	Rutan Ruteng	25.005	11.610	36.615
13	Rutan Maumere	115.079		115.079
14	Rutan Larantuka	51.260		51.260
15	Lapas Anak	-		-
16	Rupbasan	-		-
17	LPT Waikabubak	40.715		40.715
18	Bapas Waikabubak	-		-
19	Lapas Lembata		993	993
20	Lapas Wanita Kupang	-		-
21	Rutan Kupang	-		-
	JUMLAH	1.857.240	22.603	1.879.843

Keterangan:

- LPKA Kupang, Rutan Kupang, LP Wanita Kupang, Rupbasan Kupang dan Bapas Kupang tidak memiliki tanah dan bangunan gedung kantor berdiri diatas tanah milik LP Kupang.
- Bapas Waikabubak tidak memiliki tanah dan

bangunan gedung kantor berdiri diatas tanah milik LP Waikabubak.

C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan
dan Mesin
Rp58.266.41
0.537,00*

Saldo Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 sebesar Rp58.266.410.537,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.553.422.037,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp712.988.500,00 dari periode 31 Desember 2021 karena terdapat transfer masuk dari Ditjen PAS berupa Bus Pemindahan Napi, Cell Wagon, Handy Talky, Komputer, Printer, Webcam, Laptop, Lonceng, Metal Detector, Rice Cooker, X-Ray Barang dan LCD Projector. Rincian Peralatan dan Mesin Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT sebagai berikut :

Rincian Peralatan dan Mesin

Per 30 Juni 2022

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
132111	PERALATAN DAN MESIN	6.515	58.266.410.537
3.01.01	ALAT BESAR	20	470.481.740
3.01.03	ALAT BANTU	50	9.848.682.319
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	71	10.105.468.479
3.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	97	457.896.650
3.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	11	45.220.000
3.03.03	ALAT UKUR	20	20.156.766
3.04.01	ALAT PENGOLAHAN	50	987.143.400
3.05.01	ALAT KANTOR	1125	8.707.586.473
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	2490	4.720.967.926
3.06.01	ALAT STUDIO	135	342.947.767
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	387	1.619.507.953
3.06.03	PERALATAN PEMANCAR	6	11.700.000
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	226	682.647.960
3.07.02	ALAT KESEHATAN UMUM	4	38.897.000
3.08.01	UNIT ALAT LABORATORIUM	6	31.000.000
3.08.03	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	4.000.000
3.09.01	SENJATA API	182	1.356.514.898
3.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	349	2.531.432.194
3.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	73	1.421.565.958
3.10.01	KOMPUTER UNIT	701	11.047.595.959
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	494	3.233.445.650
03:13:01	SUMUR	1	559.093.885
3.15.04	ALAT KERJA PENERBANGAN	3	15.000.000
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	13	7.457.560

Perbandingan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dengan periode sebelumnya per Satuan Kerja berikut:

Perbandingan Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per Wilayah/Eselon I
Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No	Unit Pelaporan BMN	31-Dec-21 (Rp)	30-Jun-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Bapas Kupang	1.025.557.904	1.025.557.904	-
2	Lapas Kupang	7.086.216.414	7.086.216.414	-
3	Lapas Atambua	3.706.105.250	3.706.105.250	-
4	Rutan Kefa	2.733.377.359	2.781.377.359	48.000.000
5	Cab. Rutan Ba'a	993.557.673	1.026.095.673	32.538.000
6	Rutan Soe	3.046.851.555	3.093.851.555	47.000.000
7	Lapas Kalabahi	2.918.931.534	2.970.931.534	52.000.000
8	Lapas Waingapu	3.336.116.567	3.376.116.567	40.000.000
9	Lapas Waikabubak	2.342.633.081	2.360.633.081	18.000.000
10	Lapas Ende	2.392.973.357	2.490.223.857	97.250.500
11	Rutan Bajawa	2.664.666.801	2.664.666.801	-
12	Rutan Ruteng	2.261.873.901	2.261.873.901	-
13	Rutan Maumere	2.726.245.907	2.829.745.907	103.500.000
14	Rutan Larantuka	2.745.582.206	2.845.482.206	99.900.000
15	Divisi PAS	-	-	-
16	Lapas Anak	2.842.171.251	2.917.971.251	75.800.000
17	Rupbasan	1.301.937.363	1.384.437.363	82.500.000
18	LPT Waikabubak	1.513.393.977	1.513.393.977	-
19	Bapas Waikabubak	1.195.371.889	1.211.871.889	16.500.000
20	Lapas Lembata	3.430.834.961	3.430.834.961	-
21	Lapas Wanita Kupang	2.224.860.069	2.224.860.069	-
22	Rutan Kupang	5.064.163.018	5.064.163.018	-
	JUMLAH	57.553.422.037	58.266.410.537	712.988.500

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo per 31 Desember 2020	57.553.422.037
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	712.988.500
Hibah (Masuk)	-
Pembatalan Penghapusan	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	
Perolehan Lainnya	-
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (+)	-
Jumlah Mutasi Tambah	712.988.500
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-
Penghapusan	-
Transfer Keluar	-
Hibah Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	-
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	-
Penghentian aset dari penggunaan	-
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-)	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	712.988.500
Saldo per 30 Juni 2022	58.266.410.537
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2022	46.513.119.147
Nilai Buku per 30 Juni 2022	11.753.291.390

*Gedung dan
Bangunan
Rp180.518.9
86.531,00*

C.16 GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan pada Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2022 sebesar Rp180.518.986.531,00 bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp180.805.963.531,00 maka terjadi penurunan nilai gedung dan bangunan Rp286.977.000,00 dari periode 31 Desember 2021 disebabkan oleh karena adanya transfer keluar bangunan gedung kantor lama sejumlah 1 unit senilai Rp376.977.000.000,00 pada Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT dari Satker Bapas Kelas II Kupang.

Perbandingan Nilai Aset Gedung dan Bangunan Per Wilayah/Eselon I

Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

No	Unit Pelaporan BVM	31/Dec/21 (Rp)	30/Jun/22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Bapas Kupang	3.510.222.000	3.133.245.000	(376.977.000)
2	Lapas Kupang	19.849.872.000	19.849.872.000	-
3	Lapas Atambua	6.126.637.000	6.126.637.000	-
4	Rutan Kefa	10.776.737.000	10.776.737.000	-
5	Cab. Rutan Ba'a	2.874.091.000	2.874.091.000	-
6	Rutan Soe	6.321.810.000	6.321.810.000	-
7	Lapas Kalabahi	5.871.388.000	5.871.388.000	-
8	Lapas Waingapu	43.835.107.000	43.835.107.000	-
9	Lapas Waikabubak	7.836.275.000	7.836.275.000	-
10	Lapas Ende	10.438.768.000	10.438.768.000	-
11	Rutan Bajawa	5.468.350.000	5.468.350.000	-
12	Rutan Ruteng	7.634.941.000	7.634.941.000	-
13	Rutan Maumere	4.855.495.000	4.945.495.000	90.000.000
14	Rutan Larantuka	6.699.195.000	6.699.195.000	-
15	Divisi PAS	0	0	-
16	Lapas Anak	7.564.672.700	7.564.672.700	-
17	Rupbasan	6.198.963.400	6.198.963.400	-
18	LPT Waikabubak	1.778.581.000	1.778.581.000	-
19	Bapas Waikabubak	2.141.047.000	2.141.047.000	-
20	Lapas Lembata	6.040.436.000	6.040.436.000	-
21	Lapas Wanita Kupang	5.453.782.000	5.453.782.000	-
22	Rutan Kupang	9.529.593.431	9.529.593.431	-
	JUMLAH	180.805.963.531	180.518.986.531	(286.977.000)

Terdapat mutasi atau perubahan nilai gedung dan bangunan.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo per 31 Desember 2021	180.805.963.531
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	-
Pertukaran	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Pengembangan Nilai Aset	90.000.000
Koreksi Penilaian Kembali BMN	-
Koreksi barang berlebih hasil inventarisasi	-
Perolehan Lainnya	-
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra	-
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	90.000.000
B. Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-
Penghapusan	-
Transfer Keluar	376.977.000
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Penghentian aset dari penggunaan	-
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
Jumlah Mutasi Kurang	376.977.000
Jumlah Mutasi	(286.977.000)
Saldo per 30 Juni 2022	180.518.986.531
Akumulasi Penyusutan	82.387.213.418
Nilai Buku per 30 Juni 2022	98.131.773.113

Terdapat transaksi mutasi gedung dan bangunan.

Mutasi Tambah:

- Penambahan Saldo Awal Rp90.000.000,00 karena adanya pengembangan nilai asset dari belanja modal berupa instalasi jaringan listrik pada satker Rutan Maumere.

Mutasi Kurang:

Pengurangan Saldo Rp376.977.000,00 transfer keluar bangunan tempat kerja dari Bapas Kupang je Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Tetap Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2022 sebesar Rp0 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0 maka tidak terdapat perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dari periode 30 Juni 2022.

Rincian Mutasi jalan, Irigasi dan Jaringan

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo per 31 Desember 2021	-
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	
Pembelian	
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	
Reklasifikasi Masuk	
Pertukaran	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	
Pengembangan Nilai Aset	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	
Perolehan Lainnya	
Pengembangan Melalui KDP	
Jumlah Mutasi Tambah	-
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Pencatatan	-
Penghentian aset dari penggunaan	-
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-)	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	-

*Aset Tetap
Lainnya
Rp966.619.0
99,00*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Tetap Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2022 sebesar Rp966.619.099,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp964.119.099,00 maka terjadi kenaikan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp2.500.000,00.

Posisi perbandingan Saldo Aset tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut

Perbandingan Nilai Aset Tetap Lainnya Per Wilayah/Eselon I
Periode 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Nb	Unit Pelaporan BMN	31-Dec-21 (Rp)	30-Jun-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Bapas Kupang	1.798.591	1.798.591	-
2	Lapas Kupang	117.517	117.517	-
3	Lapas Atambua	176.635.500	176.635.500	-
4	Rutan Kefa	8.298.591	8.298.591	-
5	Cab. Rutan Ba'la	69.913.767	69.913.767	-
6	Rutan Soe	298.591	298.591	-
7	Lapas Kalabahi	47.102.400	47.102.400	-
8	Lapas Waingapu	0	0	-
9	Lapas Wailakubak	0	0	-
10	Lapas Ende	59.395.991	61.895.991	2.500.000
11	Rutan Bajawa	298.591	298.591	-
12	Rutan Ruteng	298.591	298.591	-
13	Rutan Maunere	298.591	298.591	-
14	Rutan Larantuka	4.543.582	4.543.582	-
15	Divisi PAS	0	0	-
16	Lapas Arak	6.400.000	6.400.000	-
17	Rupbasan	298.591	298.591	-
18	LPT Wailakubak	116.722.576	116.722.576	-
19	Bapas Wailakubak	117.517	117.517	-
20	Lapas Lembata	298.521	298.521	-
21	Lapas Wanita Kupang	471.321.591	471.321.591	-
22	Rutan Kupang	-	-	-
	JUMLAH	964.119.099	966.619.099	2.500.000

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo per 31 Desember 2021	964.119.099
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	2.500.000
Perolehan Lainnya	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (+)	-
Jumlah Mutasi Tambah	2.500.000
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-
Penghapusan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
Penghentian aset dari penggunaan	-
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-)	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	2.500.000
Saldo per 30 Juni 2022	966.619.099
Akumulasi Penyusutan	22.169.991
Nilai Buku per 30 Juni 2022	944.449.108

Mutasi Tambah

Terdapat mutasi tambah pada Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.5000.000,00 karena adanya reklsifikasi masuk reklasifikasi kode barang berupa piala pada Satker Lapas Ende

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp741.392.9
40,00*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tetap Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT per 31 Desember 2021 sebesar Rp741.392.940.00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp741.392.940,00 maka tidak terjadi kenaikan maupun penurunan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tersisa sampai dengan periode 30 Juni 2022 yakni pada satker LP Ende dan Rutan Bajawa

Perbandingan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Wilayah/Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2022

No	Uraian Wilayah/Eselon I	31/Dec/21	30/Jun/22	Kenaikan / (Penurunan)
1	Bapas Kupang	Rp -	Rp -	-
2	Lapas Kupang	Rp -	Rp -	-
3	Lapas Atambua	Rp -	Rp -	-
4	Rutan Kefa	Rp -	Rp -	-
5	Cab. Rutan Ba'a	Rp -	Rp -	-
6	Rutan Soe	Rp -	Rp -	-
7	Lapas Kalabahi	Rp -	Rp -	-
8	Lapas Waingapu	Rp -	Rp -	-
9	Lapas Waikabubak	Rp -	Rp -	-
10	Lapas Ende	Rp 374.843.750	Rp 374.843.750	-
11	Rutan Bajawa	Rp 374.765.000	Rp 374.765.000	-
12	Rutan Ruteng			-
13	Rutan Maumere	Rp -	Rp -	-
14	Rutan Larantuka	Rp -	Rp -	-
15	Divisi PAS	Rp -	Rp -	-
16	Lapas Anak	Rp -	Rp -	-
17	Rupbasan	Rp -	Rp -	-
18	LPT Waikabubak	Rp -	Rp -	-
19	Bapas Waikabubak	Rp -	Rp -	-
20	Lapas Lembata	Rp -	Rp -	-
21	Lapas Wanita Kupang	Rp -	Rp -	-
22	Rutan Kupang	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH	Rp 749.608.750	Rp 749.608.750	Rp -

Rincian Mutasi KDP

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo per 31 Desember 2021	741.392.940
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	-
Perolehan/Penambahan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Koreksi Nilai KDP (+)	-
Transfer Masuk KDP	-
Reklas KDP Menjadi Barang Jadi (+)	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai KDP (-)	-
Penghapusan/Penghentian KDP	-
Transfer Keluar KDP	-
Reklas KDP Menjadi Barang Jadi (-)	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2020	741.392.940
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	741.392.940

Tidak terdapat mutasi KDP periode 30 Juni 2022.

Pada periode 30 Juni 2022, terdapat KDP pada dua Satuan Kerja sbb:

1. LP Ende nilai KDP Rp374.843.750,00

Kontrak Perencanaan Paket Pengadaan Air Bersih (Sumur Bor + Instalasi) APBN-P Tahun Anggaran 2016 oleh CV.Galang Mitra Sejahtera,Kupang, dengan Nilai Kontrak Rp.34.350.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor SPK .W22.EC.PR.01.02-1853 A, Realisasi SP2D tgl.22 September 2016, Nomor SP2D : 160401302000199, an,CV.Galang Mitra Sejahtera, Kupang.

Sebagai Pelaksana Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Air Bersih (Sumur Bor+Instalasi Air) APBN-P TA.2016 an. CV. Sumber Rejeki sebesar Rp.494.049.000,-(empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah) Tgl.23 September 2016, No.Kontrak .W22.EC.PL.02.01-2085, Realisasi Pembayaran Termin I (40%) sebesar Rp.

172.917.150,-(seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah), dengan SP2D No.160401303002587 tgl.25 November 2016, dan Termin II (60%) sebesar Rp.98.809.800,-(sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan SP2D No.160401303002990 tgl.9 Desember 2016,

Pada Paket Pekerjaan Pengadaan Air Bersih kami mengadakan Kontrak Pengawasan dengan Konsultan Pengawas CV,ARILES DESIGN, No.SPK.W22.EC.PL.02.01-2071 A tgl. 23 September 2016, dengan Nilai Kontrak Pengawas sebesar Rp.23.200.000,-(dua puluh tiga juta dua ratus rupiah), Realisasi Kontrak Pengawas dengan SP2D NO.160401301006270, tgl 20 Desember 2016,

Pekerjaan Kontruksi pendukung berupa bak penampung yang memiliki daya tampung 50.000 liter air dan Tower dengan ukuran daya tampung 5.000 liter air, pekerjaan instalasi ke seluruh blok hunian dan kantor telah diselesaikan dengan baik dan sesuai spesifikasi yang direkomendasikan (100%) (Laporan Progres Minggu Terakhir dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan terlampir).

Selain biaya yang timbul dari Paket Pekerjaan Pengadaan Air Bersih (Sumur Bor + Instalasi) ada pula biaya lain yang turut sertamendukung kegiatan ini adalah biaya – biaya operasional kegiatan, dan dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Biaya Mobilitas dan Konsultasi dan Koordinasi ke Kantor Wilayah sebesar Rp. 11.931.800,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah), direalisasi dengan SP2D No.160401303002175 tgl.12 Oktober

- 2016;
- Honor Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan sebesar Rp.3.740.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) SP2D No.160401303002557 tgl.22 November 2016;
 - Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) SP2D No.160401303002558 tgl.22 November 2016;
 - Biaya Pengawas Teknis Pekerjaan (PTP) sebesar Rp.17.587.500,-(tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),SP2D No.160401303002986 tgl 9 Desember 2016;
 - Biaya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebesar Rp.1.860.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) SP2D No. 160401303002987, tgl.9 Desember 2016;

Adapun tidak tercapainya Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan 100% (seratus persen) secara keseluruhan pada Paket Pekerjaan Pengadaan Air Bersih (Sumur Bor + Instalasi)bukan diakibatkan kelalaian atau kemampuan Pelaksana (Pemborong) namun dikarenakan struktur tanah disekitar area Eksplorasi Air yang telah ditentukan secara Geolistrik oleh Konsultan Perencana adalah berpasir sehingga selalu mengalami **Longsor** pada kedalaman tertentu, sehingga secara prosedur kami (PPK) bersama Pelaksana (Pemborong), Konsultan Pengawas dan Pengawas Teknis Pekerjaan (PTP) bersama mengadakan rapat dan bersepakat untuk melakukan perpindahan Titik eksplorasi dari satu titik eksplorasi ke titik eksplorasi lain yang kurang lebih 6 (enam)

titik eksplorasi, namun hingga akhir kontrak dan batas akhir penarikan dana tetap mengalami kesulitan dan hambatan yang sama, yaitu selalu **Longsor** pada kedalaman tertentu disetiap titik perpindahan eksplorasi, sehingga tetap tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan bersama.

Dengan demikian persentase pencapaian secara keseluruhan untuk Paket Pengadaan Air Bersih (Sumur Bor+Instalasi) APBN-P Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 65,12% (enam puluh lima persen koma dua belas persen).

2. Rutan Bajawa nilai KDP Rp559.093.885,00

Informasi terkait KDP Rutan Bajawa:

Tahun 2016 Kantor Rumah Tahanan negara Kelas IIB Bajawa Belanja Modal dari dana APBNP T.A 2016 sebesar Rp. 611.811.000 dengan rincian pencairan sebagai berikut :

- a) Kontrak Perencanaan Nomor : W22.EE.PL.06.04-585
 - Perencanaan Pengadaan Instalasi Air Bersih (Sumur Bor) dengan Nilai Sebesar Rp. 34.350.000.
 - Tanggal Kontrak/Jangka Waktu (10-08-2106 s/d 29-08-2016)
 - Nomor dan tanggal SP2D : 161111302000048 tanggal. 19-09-2016
 - Kontraktor CV. Galang Mitra Sejahtera
 - Pencairan 100% Rp. 34.350.000

- b) Kontrak Pihak Ketiga Nomor : W22.EE.PL.06.04-724
 - Pekerjaan Pengadaan Instalasi Air Bersih (Sumur Bor)
 - Nilai Kontrak : Rp. 500.547.000
 - Jangka waktu Pekerjaan : 05-10-2016 s/d 08-12-2016
 - Kontraktor CV. Tiga Putra

- Pencairan Uang Muka Pekerjaan (30%) : Rp. 150.164.100,- , Nomor SP2D 161111303002730, tanggal 01-11-2016
- Pencairan Biaya Konsultasi dan Koordinasi Pengadaan Instalasi Air Bersih (Sumur Bor) Rp. 6.965.000,- Nomor SP2D 161111303002405, tanggal 04-10-2016
- Pencairan Biaya Konsultasi dan Koordinasi Pengadaan Instalasi Air Bersih (Sumur Bor) Rp. 21.313.000,- Nomor SP2D 161111303003053, tanggal 28-11-2016
- Pencairan Biaya Konsultasi dan Koordinasi serta Honor Pengadaan Instalasi Air Bersih (Sumur Bor) Rp. 21.989.000,- Nomor SP2D 161111303003454, tanggal 08-12-2016
- Pencairan Pembayaran Prestasi Pekerjaan 53,37% sesuai kontrak Adendum Nomor : W22.EE.PL.06.04-873 Tanggal: 05-12-2016 masa waktu adendum dari tanggal 09-12-2016 s/d tanggal 19-12-2016 adalah sebesar Rp. 116.983.900 dengan Nomor SP2D. 161111303003738 Tanggal 27-12-2016
- Pencairan Biaya Konsultan Pengawas An. CV. Fatusahan Desain sebesar Rp. 23.000.000,- dengan Nomor SP2D. 161111303003735, Tanggal 27-12-2016

2. Penjelasan Singkat Terkait KDP pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa TA 2016 adalah sebesar Rp 374.765.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan presentasi pengerjaan terakhir sebesar 53,37% sesuai kontrak tanggal 05 Oktober 2016 s/d 08 Desember 2016 Nomor : W22.EE.PL.06.04-724, dan Adendum

Kontrak Nomor: W22.EE.PL.06.04-873 Tanggal: 05 Desember 2016 dengan jangka waktu adendum dari tanggal 09 Desember 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016, BAST Nomor : W22.EE.PL.06.04-887 tanggal 22 Desember 2016 dan BAP Nomor: 03/PPHP-RTN/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 maka pekerjaan sumur bor pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bajawa hanya mencapai 53,37 % dikarenakan proses pengeboran yang tidak sampai mendapatkan sumber air sesuai waktu yang sudah di sepakati bersama karena kontrak diatas adalah kontrak Lone Some atau sampai mendapatkan air sehingga penyedia di nyatakan di PHK dengan sebelumnya sudah dikeluarkan surat teguran dari pihak Konsultan Pengawas maupun PPK. Maka pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan fisik yang telah disediakan oleh pihak penyedia yaitu 53,37%.

3. Masalah Yang terjadi Terkait Proses Pengerjaan Sumur Bor dari sisi teknis pekerjaan yang mengalami Kegagalan adalah sebagai berikut :

NO	TANGGAL PEKERJAAN	URAIAN PEKERJAAN
1	15 November 2016	Mulai Pengeboran 6" kedalaman 0-6 m, Lapisan lunak, 6-8 m, terjadi Water lose batuan sedang (air 2 Tangki)
2	16 November 2016	Pengeboran 8-12 m, water lose batuan sedang, terjadi batuan gerak ditambah kendala terjepit selama 4 jam baru bisa diatasi (air 2 tangki)
3	17 November 2016	Pengeboran 12-14 m batuan keras, ketebalan batu 2 m, kendala pipa putus (air 2 tangki)
4	18 November 2016	Mengatasi pipa putus dan membuat alat untuk pengambilan pipa yang putus tersebut pada pukul 13.00 wita, setelah dilakukan dan dikerjakan yang memakan waktu hingga sampai pukul 17.00 wita baru dapat teratasi.

5	19 November 2016	Lanjutkan pengeboran pipa 4" dikedalaman 14-18 m, terdapat lapisan batuan lepas dan batuan sedang.
6	20 November 2016	Mencari tanah liat atau lumpur sebanyak 2 dump truck untuk pengecoran lubang sumur untuk mengantisipasi Water Lose agar tidak terjadinya batuan longsor.
7	21 November 2016	Pengeboran awal 0-18 m pada pengecoran lubang yang sudah dibor untuk mengatasi Water Lose dan batuan lepas
8	22 November 2016	Pengeboran mata bor 4" dikedalana 18-20 m lapisan batuan sedang dan batuan gerak dengan cara mengebor sambil memasukan gumpalan lumpur/tanah liat bulat kedalam lubang sumur dan bersamaan dengan pipa bor berputar
9	23 November 2016	Pengeboran mata bor 4" dikedalaman 20-26 m lapisan batuan lepas dan terjadi longoran cara penanganannya yaitu mengebor sambil memasukan gumpalan lumpur/tanah liat bulat kedalam lubang sumur dan bersamaan dengan pipa bor berputar dan berlangsung sampai jam 22.00 wita
10	24 November 2016	Pengeboran pembesaran 6" dikedalaman 14-26 m cara pengeboran yaitu mengebor sambil memasukan gumpalan lumpur/tanah liat bulat kedalam lubang sumur dan bersamaan dengan pipa bor berputar dan berlangsung sampai jam 23.00 wita
11	25 November 2016	Pengeboran 4" dikedalaman 26-32 m lapisan batuan keras 2 m (26-28). pipa 4" dikedalaman 28-32 m lapisan batu lepas Water Lose dan longsor yang sangat sulit diatasi
12	26 November 2016	Pembuatan mata bor dengan model corring untuk mengatasi Water Lose dan longsor dengan cara pengeborannya yaitu mengebor sambil memasukan gumpalan lumpur/tanah liat bulat kedalam lubang sumur dan bersamaan dengan pipa bor berputar, masalah baru dapat teratasi saat pengeboran mencapai 42 lapisan pasir dan tanah cadas, pengeboran berlangsung hingga pukul 22.00 wita
13	28 November 2016	Pengecoran lumpur/tanah liat kedalam 32 m sampai rata dengan tanah atau 0 m

14	29 November 2016	Pengeboran 8" dikedalaman 0-18 m masalah yang terjadi yaitu sering terjepitnya mata bor dan cara pengeborannya yaitu sirkulasi air diinjek/dibuka dan tutup menggunakan air lumpur kental
15	30 November 2016	Pengeboran 8" dikedalaman 18-26 m dengan cara kerja sirkulasi air diinjek/dibuka dan tutup menggunakan air lumpur kental, masih terdapat longsor sebanyak 4 kali, kembali ke kedalaman 18 m dan dilakukan pengeboran 6" sampai kedalaman 26 m
16	01 Desember 2016	Pengeboran pipa 6 " untuk mengatasi longsor pada lubang dan kembali ke kedalaman 16 m dan pengeboran dilakukan dengan cara corring dan mengambil batu sesuai panjang mata bor (sample ada dilokasi)
17	02 Desember 2016	Pengeboran pipa 6" dikedalaman 16-18 m longsor batu bisa diatasi dengan cara kerja yaitu mengebor sambil memasukan gumpalan lumpur/tanah liat bulat kedalam lubang sumur dan bersamaan dengan pipa bor berputar kemudian dilakukan sirkulasi air diinjek/dibuka dan tutup menggunakan air lumpur kental
18	03 Desember 2016	Pengeboran pipa 6" dikedalaman 18-20 m dengan cara pengerjaan yaitu mengebor sambil memasukan gumpalan lumpur/tanah liat bulat kedalam lubang sumur dan bersamaan dengan pipa bor berputar kemudian dilakukan sirkulasi air diinjek/dibuka dan tutup menggunakan air lumpur kental
19	04 Desember 2016	Pembuatan mata bor 4 kali pembuatan dan memakan waktu 1 hari kerja
20	05 Desember 2016	Pengeboran pipa 6" dikedalaman 20-21 m dengan cara pengerjaan yaitu mengebor sambil memasukan gumpalan lumpur/tanah liat bulat kedalam lubang sumur dan bersamaan dengan pipa bor berputar kemudian dilakukan sirkulasi air diinjek/dibuka dan tutup menggunakan air lumpur kental
21	06 Desember 2016	Mesin rusak namun dapat teratasi, dilanjutkan pengeboran pada pukul 13.00 wita dengan pipa 6" dikedalaman 21-22 m dengan cara pengerjaan yaitu mengebor sambil memasukan gumpalan lumpur/tanah liat bulat kedalam lubang

		sumur dan bersamaan dengan pipa bor berputar kemudian dilakukan sirkulasi air diinjek/dibuka dan tutup menggunakan air lumpur kental
--	--	--

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(82.085.8
90.204,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(128.922.502.556,00) dan Rp(122.911.624.521,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	-46.513.119.147	0
2	Gedung dan Bangunan	0	-82.387.213.418	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya		-22.169.991	
	Akumulasi Penyusutan	0	-128.922.502.556	0

*Aset Tak
Berwujud
Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud Tetap Unit Eselon I Direktorat Jenderal Pemasaryakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00. Tidak terdapat perubahan nilai saldo Aset Tak Berwujud.

Perbandingan Nilai Aset Tak Berwujud Per Wilayah/Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 30 Juni 2022

No	Uraian Wilayah/Eselon I	31/Dec/21	30/Jun/22	Kenaikan / (Penurunan)
1	Bapas Kupang	Rp -	Rp -	-
2	Lapas Kupang	Rp -	Rp -	-
3	Lapas Atambua	Rp -	Rp -	-
4	Rutan Kefa	Rp -	Rp -	-
5	Cab. Rutan Ba'a	Rp -	Rp -	-
6	Rutan Soe	Rp -	Rp -	-
7	Lapas Kalabahi	Rp -	Rp -	-
8	Lapas Waingapu	Rp -	Rp -	-
9	Lapas Waikabubak	Rp -	Rp -	-
10	Lapas Ende	Rp -	Rp -	-
11	Rutan Bajawa	Rp -	Rp -	-
12	Rutan Ruteng	Rp -	Rp -	-
13	Rutan Maumere	Rp -	Rp -	-
14	Rutan Larantuka	Rp -	Rp -	-
15	Lapas Anak	Rp -	Rp -	-
16	Rupbasan	Rp -	Rp -	-
17	LPT Waikabubak	Rp -	Rp -	-
18	Bapas Waikabubak	Rp -	Rp -	-
19	Lapas Lembata	Rp -	Rp -	-
20	Lapas Wanita Kupang	Rp -	Rp -	-
21	Rutan Kupang	Rp -	Rp -	-
22	Divisi PAS	Rp -	Rp -	-
	JUMLAH	Rp -	Rp -	Rp -

Tidak terdapat mutasi atau perubahan nilai Aset Tak Berwujud.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo per 31 Desember 2019	-
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	-
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Lainnya	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	-
Transfer Keluar	-
Penghentian aset dari penggunaan	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2020	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	-

Tidak terdapat mutasi aset tak berwujud dalam periode 30 Juni 2022.

Dari jumlah Aset Tak Berwujud diatas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 unit kuantitas (sesuai dengan satuan barang masing-masing) dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Aset Tak Berwujud yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (Nol rupiah).

C.22 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp8.296.094,00*

Saldo Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT per 30 Juni 2022 sebesar Rp8.296.094.814,00 bila dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.472.687.814,00 terjadi penurunan sebesar Rp176.593.000,00 dari periode 31 Desember 2021 karena

penghapusan BMN yang dihentikan penggunaan pada satker Rupbasan Kupang.

Perbandingan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Per Wilayah/Eselon I

Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Nb	Unit Pelaporan BMN	31-Dec-21 (Rp)	30-Jun-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Bapas Kupang	229.497.235	229.497.235	-
2	Lapas Kupang	322.260.744	146.460.744	(175.800.000)
3	Lapas Atambua	856.999.223	856.999.223	-
4	Rutan Kefa	0	0	-
5	Cab. Rutan Ba'a	126.821.564	126.028.564	(793.000)
6	Rutan Soe	904.403.308	904.403.308	-
7	Lapas Kalabahi	302.197.423	302.197.423	-
8	Lapas Waingapu	386.724.247	386.724.247	-
9	Lapas Waikabubak	421.717.902	421.717.902	-
10	Lapas Ende	394.650.490	394.650.490	-
11	Rutan Bajawa	36.662.000	36.662.000	-
12	Rutan Ruteng	47.318.700	47.318.700	-
13	Rutan Maunere	199.063.810	199.063.810	-
14	Rutan Larantuka	18.657.600	18.657.600	-
15	Divisi PAS	0	0	-
16	Lapas Anak	2.566.591.847	2.566.591.847	-
17	Rupbasan	28.567.658	28.567.658	-
18	LPT Waikabubak	866.612.729	866.612.729	-
19	Bapas Waikabubak	99.185.360	99.185.360	-
20	Lapas Lembata	120.266.974	120.266.974	-
21	Lapas Wanita Kupang	206.128.400	206.128.400	-
22	Rutan Kupang	338.360.600	338.360.600	-
	JUMLAH	8.472.687.814	8.296.094.814	(176.593.000)

Rincian mutasi atau perubahan nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan adalah sebesar Rp176.593.000,00

**Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi
Pemerintahan**

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo per 31 Desember 2021	8.472.687.814
A. Mutasi Tambah	
Penambahan saldo awal	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Hibah (Masuk)	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Lainnya	-
Penyelesaian Pembangunan Langsung	-
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentika	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (+)	-
Reklasifikasi Dari aset Tetap ke aset lainnya	-
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (+)	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
B. Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (-)	-
Penghapusan	176.593.000
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Koreksi Pencatatan	-
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	-
Penghapusan (BMN Yang Dihentikan)	-
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (-)	-
Jumlah Mutasi Kurang	176.593.000
Jumlah Mutasi	(176.593.000)
Saldo per 30 Juni 2022	8.296.094.814
Akumulasi Penyusutan	(7.988.055.588)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	16.284.150.402

Mutasi Kurang

- **Penghapusan** senilai (Rp176.593.000,00)

terdapat pada Satker:

- ✓ Lapas Kupang senilai (Rp175.800.000,00)

berupa:

- Bangunan Gedung tempat ibadah nup 5 dan 6 dan Gedung pos jaga pada Gedung kantor bekas Lapas Kupang dilakukan penghapusan karena Gedung tidak ditemukan.

- ✓ Lapas Baa senilai (Rp793.000,00) berupa:

- Bangunan Gedung kantor bekas Lapas Baa dilakukan penghapusan karena Gedung tidak ditemukan.

C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Lain

Akumulasi dan Amortisasi Aset lainnya Rp(6.351.331.733.00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(7.988.055.588,00) dan Rp(8.120.951.919,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	-7.988.055.588	
	Akumulasi Penyusutan	0	-7.988.055.588	0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp810.367.200,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp751.547.169,00 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp8.288.934

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp8.288.934.815,00 dan Rp784,331.938,00. Utang kepada

.815,00

Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian / Utang kepada Pihak Ketiga

No	Nama UPT	Nominal (RP)	Keterangan
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	779.136.080,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
2	LAPAS ATAMBUA	459.990.904,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
3	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	333.688.195,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
4	LAPAS KELAS III BAA	212.707.461,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
5	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	382.929.114,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAH	433.577.267,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAINGAPU	468.919.038,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	491.232.704,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	489.411.595,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
10	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	340.202.076,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
11	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	356.431.423,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
12	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	272.067.543,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
13	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	302.146.734,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA WAIKABUBAK	209.848.431,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
15	BALAI PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	126.218.259,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
16	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	427.852.194,00	Gaji Pegawai bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2Dnya terbit di bulan Juli
17	BALAI PEMASYARAKATAN KUPANG	4.800.000,00	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Pengelola Keuangan Bulan Juni yang SP2Dnya terbit bulan Juli

18	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	5.915.824,00	Pembayaran Belanja Barang Berupa Honor Pengelola Keuangan Bulan Juni yang SP2Dnya terbit bulan Juli
19	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	229.637.300,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
20	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	34.580.000,00	Pembayaran Belanja Barang berupa Pembelian Pemenuhan Sandang Sehari-hari sesuai Kuitansi Nomor: 002/PN-2022 Tanggal 27 Juni 2022, BAST Nomor: W22.EF.PB.02.01-70 Tanggal 25 Juni 2022 yang SP2DNYA di bulan Juli
21	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KUPANG	6.000.000,00	Honor PPNPN Bulan Juli Sp2d Terbit Bulan Juli
22	BALAI PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	1.000.000,00	Honor PPNPN Bulan Juli Sp2d Terbit Bulan Juli
23	BALAI PEMASYARAKATAN KUPANG	364.453.238,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
24	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LPA) KUPANG	507.595.160,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
25	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KUPANG	242.805.559,00	Gaji Pegawai bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2Dnya terbit di bulan Juli
26	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	307.928.465,00	Gaji Pegawai bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2Dnya terbit di bulan Juli
27	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	484.511.418,00	SPM Gaji Induk Pegawai Bulan Juli dan Gaji 13 yang SP2D nya belum terbit
28	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	13.348.833,00	GUP KKP untuk tagihan bulan Juli
JUMLAH		8.288.934.815,00	

*Pendapatan
yang
Ditangguhkan
Rp0*

C.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatam diterima di muka dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

Uraian	Jumlah
Pendapatan PNBP	-
PPH yang belum disetor	-
Total	-

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0*

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp16.785.369,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang dan jasa.

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
Lapas Kelas IIA Kupang	-
	-
	-
Total	-

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0*

C.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus

Dibayar 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	83.353.964
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	-
Jumlah	-	83.353.964

C.29 Utang Jangka Pendek lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.006,977,00- dan Rp0,- Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

Rincian Utang Jangka Pendek

Nama UPT	Nilai	Keterangan
RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	2.117.587,00	Pungutan Pajak yang belum disetorkan
RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	2.889.390,00	Pungutan Pajak yang belum disetorkan
Jumlah	5.006.977	

C.30 Utang Yang belum ditagihkan

Nilai utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.212.223.843,00 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian utang yang belum ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum ditagihkam

NO	NAMA UPT	NILAI	KETERA
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	349.340.223,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022 dan Kwitans kan
2	LAPAS ATAMBUA	127.079.244,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022
3	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	80.009.679,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022 dan Kwitans kan
4	LAPAS KELAS III BAA	70.866.483,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022 dan Kwitans kan
5	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	170.789.771,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	153.396.453,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022 dan Kwitans kan
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAINGAPU	185.313.997,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022 dan Kwitans kan
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	216.882.478,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022

9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	124.624.451,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022
10	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	108.212.316,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022 dan Kwitansi
11	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	4.150.987,00	Pembayaran Listrik dan tele sudah dibuatkan kuitansi na
12	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	97.383.572,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022
13	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	80.513.182,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LPA) KUPANG	27.000.000,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022
15	LAPAS TERBUKA WAIKABUBAK	96.195.307,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022
16	BAPAS WAIKABUBAK	45.000.000,00	
17	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KUPANG	9.250.100,00	Pembayaran Listrik dan tele sudah dibuatkan kuitansi na
18	LAPAS LEMBATA	63.096.508,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022
19	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	203.119.092,00	Pembayaran BAMA Bulan J bulan Juli 2022
JUMLAH		2.212.223.843	

C.31 Hibah yang belum disahkan

Nilai hibah yang belum disahkan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0. Hibah yang belum disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan . Adapun rincian Hibah yang belum disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Hibah Yang belum disahkan	300.000.000	-
	-	-
Jumlah	300.000.000	-

Hibah yang belum disahkan merupakan Hibah Tanah oleh Pemerintah Kabupaten Lembata kepada satker Lapas Lembata yang MPHL BJS di keluarkan pada bulan Juli 2022.

C. Ekuitas

Ekuitas
Rp1.810.890.888.926,00

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.810.890.888.926,00 dan

Rp1.829.405.304.862,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp121.487.69
6,00*

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Basis akrual akuntansi Pendapatan-LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya hak atas pendapatan terjadi, tanpa memerhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur berasal dari:

- Pendapatan Penjualan hasil produksi nonlitbang lainnya
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan bangunan
- Pendapatan Pelayanan dan administrasi hukum lainnya
- Pendapatan Jasa Lainnya

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp149.849.850 dan Rp101.959.404,00

dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 30 Juni 2021
dan 30 Juni 2020*

URAIAN	30 Juni 2022	31 Desember 2021	NAIK (TURUN)
Pendapatan PNBP	121.487.696	149.849.850	-2334,5
Pendapatan Aset Non Lancar	-	-	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional	-	-	
Jumlah	121.487.696	149.849.850	(

Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut

Perbandingan Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022

Pendapatan PNBP-LO	Pendapatan PNBP-LRA	Selisih
121.487.696	149.849.850	(28.362.154,00)

Rincian selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih PNBP-LO dan PNBP-LRA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021

Uraian	PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi non litbang lainnya	5.582.600	5.582.600	0,00
Pendapatan Pemindahtanganan BMN	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	87.267.146	63.906.486	23.360.660
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	25.747.850	25.747.850	0,00

Penerrimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	6.295.481	-6.295.481,00
Penerrimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	7.852.449	-7.852.449,00
Pendapatan anggaran lain-lain	2.890.100	2.890.100	0
TOTAL	121.487.696	112.274.966	(9.212.730,00)

Penjelasan selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan sewa tanah dan gedung pencatatan akrual atas pendapatan yang diterima dimuka senilai Rp.16.785.369,00
2. Penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu pendapatan ini membentuk pendapatan kegiatan non operasional lainnya di-LO

D.2 Beban Pegawai

*Beban
Pegawai
Rp34.551.865
.330,00*

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp39.773.238.127,00 dan Rp34.551.865.330.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan

yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN JENIS BEBAN	Per 30 Juni 2022	Per 30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	28.301.627.602	23.818.863.089	15,84
Beban Tunjangan-Tunjangan	6.777.597.218	5.804.300.583	14,36
Beban Uang makan PNS	4.663.347.150	4.887.344.000	(4,80)
Beban Lembur	32.828.000	41.718.000	(27,08)
Pengembalian-Pengembalian	-2.161.843	-360.342	83
Jumlah	39.773.238.127	34.551.865.330	0,1313

Rincian perbandingan Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA per 30 Juni 2021 ;

BEBAN PEGAWAI LO	BELANJA PEGAWAI LRA	SELISIH LO DAN LRA
39.773.238.127	32.056.538.119	7.716.700.008

selisih antara beban pegawai pada LO dan Belanja Pegawai Pada LRA disebabkan Pembebanan Gaji Bulan Juli yang telah diakui secara akrual sesuai dengan SP2d pada bulan Juni.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp2.371.341.
946,00*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.371.341.946,00 dan Rp2.383.703.874,00

*Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2022 dan
30 Juni 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.367.105.546	2.383.703.874	(0,70)
Beban Amunisi	550.000	0	#DIV/0!
Beban Persediaan pita cukai, materai, dan leges	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku	3.287.500	0	#DIV/0!
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	398.900	-	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	2.371.341.946	2.383.703.874	(0,52)

Perbandingan Beban Persediaan di LO dan Belanja
Persediaan di LRA per 30 Jun 2021 :

BEBAN PERSEDIAAN LO	BELANJA PERSEDIAAN LRA	SELISIH LO DAN LRA
2.371.341.946	1.608.301.320	763.040.626

Selisih antara Beban Persediaan di LO diakui saat terjadi konsumsi persediaan sedangkan belanja persediaan di LRA diakui Ketika terjadi pengeluaran kas.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp19.039.173.899,00 dan Rp14.923.682.942,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni
2021 dan 30 Juni 2021

*Beban Barang
dan Jasa
Rp14.915.641.
942,00*

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.895.922.407	498.197.694	280,56
beban Pengadaan Bahan Makanan	12.655.425.949	9.843.509.364	28,57
Pengembalian Beban Bahan	0	0	#DIV/0!
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	380.458.225	324.957.242	17,08
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.200.844	19.589.702	3,12
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	558.630.000	453.610.000	23,15
Beban Barang Operasional Lainnya	361.756.330	1.104.472.000	-67,25
Beban Barang Operasional pandemi covid19	87.907.713	23.701.310	270,90
Beban Bahan	1.267.014.733	986.019.800	-91,08
Beban Honor Output Kegiatan	74.650.000	74.880.000	-0,31
Beban Barang Non Operasional Lainnya	589.766.859	611.164.689	#REF!
Beban Barang nonOperasional pandemi covid19	154.574.795	171.436.309	
Beban Langganan Listrik	433.417.669	421.062.510	40,07
Beban Langganan Telepon	111.875.255	109.563.192	41,08
Beban Langganan Air	154.682.620	92.827.330	66,63
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa lainnya	22.780.000	0	#DIV/0!
Beban Sewa	87.600.000	70.404.800	24,42
Beban Jasa Profesi	83.140.000	111.117.000	-25,18
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	99.370.500	7.170.000	
Pengembalian beban Honor Output Kegiatan	0		#DIV/0!
Jumlah	19.039.173.899	14.923.682.942	27,58

*Perbandingan Beban Barang dan Jasa di LO dan
Belanja Barang dan Jasa Di LRA per 30 Juni 2022*

BEBAN BARANG DAN JASA LO	BELANJA BARANG DAN JASA LRA	SELISIH LO DAN LRA
19.039.173.899	17.068.181.712	1.970.992.187

*Rincian selisih Beban Barang dan Jasa di LO dan
Belanja Barang dan Jasa Di LR per 30 Juni 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	Beban Belanja barang dan Jasa di LO	Belanja Belanja barang dan Jasa di LRA	SELISIH
Beban Keperluan Perkantoran	1.895.922.407	1.877.531.357	18.391.050
beban Pengadaan Bahan Makanan	12.655.425.949	10.970.644.714	1.684.781.235
Pengembalian Beban Bahan	0	0	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	380.458.225	365.676.225	14.782.000
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.200.844	20.163.654	37.190
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	558.630.000	553.830.000	4.800.000
Beban Barang Operasional Lainnya	361.756.330	276.725.990	85.030.340
Beban Barang Operasional pandemi covid19	87.907.713	83.553.213	4.354.500
Beban Bahan	1.267.014.733	1.235.796.933	31.217.800
Beban Honor Output Kegiatan	74.650.000	74.650.000	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	589.766.859	566.066.859	23.700.000
Beban Barang nonOperasional pandemi covid19	154.574.795	153.074.795	1.500.000
Beban Langganan Listrik	433.417.669	439.926.507	-6.508.838
Beban Langganan Telepon	111.875.255	104.259.535	7.615.720
Beban Langganan Air	154.682.620	152.761.930	1.920.690
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	0	-
Beban Jasa Lainnya	22.780.000	22.780.000	-
Beban Sewa	87.600.000	87.600.000	-
Beban Jasa Profesi	83.140.000	83.140.000	-
Beban Aset Ekstrakomtabel	99.370.500	0	
Pengembalian beban Honor Output Kegiatan	0	0	-
Jumlah	19.039.173.899	17.068.181.712	1.970.992.187

Perhitungan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut :

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dan Belanja Barang khusus pembentuk Belanja Barang dan Jasa-LRA sebesar (Rp1.970.922.187,00) karena ada faktor yang mengurangi Beban Tahun Anggaran Berjalan karena merupakan Beban Operasional Tahun Anggaran Yang Lalu yaitu: Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL sebesar Rp784.331.938,00 dan adanya pembebanan belanja bulan Juli yang SP2Dnya terbit dibulan Juni sebesar Rp1.186.590.249,00.

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp3.860.179.1
17,00*

Beban Pemeliharaan Semester I 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.860.179.117,00 dan Rp3.584.222.224,00.

Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2021
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.550.982.249	2.695.997.117
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.078.957.812	888.025.107
Beban Pemeliharaan Lainnya	0	0
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	230.155.056	200.000
Beban Persediaan suku Cadang	84.000	
Jumlah	3.860.179.117	3.584.222.224

Perbandingan Beban Pemeliharaan di LO dan Belanja Pemeliharaan Di LRA per 30 Juni 2022

BEBAN PEMELIHARAAN LO	BELANJA PEMELIHARAAN LRA	SELISIH LO DAN LRA
3.860.179.117	3.613.311.261	246.867.856

Perhitungan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

a	Beban Pemeliharaan-LO	3.860.179.117
b	Belanja Pemeliharaan-LRA (Akun 523xxx)	3.613.311.261
c	Selisih LO dengan LRA	246.867.856
	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
d	Hibah Barang Pemeliharaan	
e	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	230.155.056
f	Beban Persediaan Suku Cadang	84.000
g	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	
	Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban	
h		
i	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	
j	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan M	
k	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jaringan	
l	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	
m	Belanja Akun Pemeliharaan yang membentuk Beban	
n	Transaksi Belanja Pemeliharaan yang membentuk Aset karena memenuhi nilai kapitalisasi aset.	16.628.800
o	TOTAL FAKTOR YANG MEMPENGARUHI (d + h + m + n)	246.867.856
	Selisih (c – o)	0,00

Dari tabel diatas dapat disimpulkan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp246.867.856,00 disebabkan adanya faktor yang mengurangi Beban Pemeliharaan-LO tahun berjalan yaitu Transaksi Belanja Akun Pemeliharaan yang membentuk Beban Persediaan-LO

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.553.527.785,00 dan Rp1.250.296.270,00 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.553.527.
785,00*

Dinas untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021
Beban Perjalanan Biasa	1.266.452.785	1.113.276.270
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	269.075.000	137.020.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0
Jumlah	1.535.527.785	1.250.296.270

Perbandingan Beban Barang dan Jasa di LO dan Belanja Barang dan Jasa Di LRA per 30 Juni 2022

BEBAN PERJALANAN DINAS LO	BELANJA PERJALANAN DINAS LRA	SELISIH LO DAN LRA
1.535.527.785	1.489.587.095	45.940.690

Selisih beban perjalanan dinas LO maupun LRA disebabkan Beban Perjalanan dinas di LO diakui saat terjadi perjalanan dinas sedangkan belanja persediaan di LRA diakui Ketika terjadi pengeluaran kas /terbit SP2D. .

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp500.000

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp500.000,00 dan Rp0.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Persediaan pita cukai , materai dan leges	500.000	0	#DIV/0!
Jumlah	500.000	0	#DIV/0!

Beban barang diserahkan kepada masyarakat berupa beban barang persediaan pita cukai, materai dan leges pada satker Lapas Ende karena kesalahan kode barang pada saat penginputan pada aplikasi persediaan.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi
Rp6.070.653.
674 ,00*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.070.653.674,00 dan Rp7.064.063.691,00. Beban Penyusutan merupakan

beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30 Juni 2022	30 Juni 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.066.693.456	2.425.639.514	26,43
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.996.727.404	4.596.151.780	(34,80)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	7.232.814	42.272.397	(82,89)
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.070.653.674	7.064.063.691	(14,06)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp403.541,00*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp403.541,00 dan Rp701.201,00.

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun
30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	403.541	701.201	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	-	-
Jumlah	403.541	701.201	-

Penjelasan selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

a	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO	403.741
	Penyisihan Piutang Akhir	-403.741
	Penyisihan Piutang Awal	0
	Penghapusan Piutang	0
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Penyisihan Piutang	0
	Jurnal Transfer Masuk atas Penyisihan Piutang	0
	Jurnal Transfer Keluar atas Penyisihan Piutang	0
b	Beban Penyisihan Piutang Total	403.741
	Selisih (a - b)	0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester I 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp,00*

Rincian Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN	30 JUNI 2022	30 JUNI 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan aset Non Lancar	0	1.921.111	-100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	36.463.855	0	#DIV/0!
Surplus/(Defisit) Pelepasan aset Non Lancar lainnya	- 36.463.855	1.921.111	
Pendapatan kegiatan Non Operasional Lainnya	1.302.439.704	300.000	#####
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya	1.369.050.000		
Surplus / (defisit) dari kegiatan non Operasional	- 66.610.296	300.000	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	- 103.074.151	2.221.111	-4740,66

Pendapatan Non Operasional Lainnya-LO adalah pendapatan yang tidak membentuk pendapatan operasional tahun berjalan karena bukan merupakan pendapatan operasional dari menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti pendapatan dari Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara, Tuntutan Perbendaharaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi, Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan lain-lain.

Untuk pendapatan pelepasan aset non lancar pada tabel diatas merupakan pendapatan non operasional yang diperoleh dari :

1. Pendapatan penyesuaian nilai Beban kerugian pelepasan aset Rp36.463.855;

2. Penyesuaian nilai persediaan Rp1.302.439.704,00 yang dari Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp(72.855.777,00), Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp6.295.389,00 dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan Rp1.369.000.000,00;
3. Beban penyesuaian nilai persediaan Rp1.369.050.000,00.

D.12 Pos Luar Biasa

*Pos Luar
Biasa Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

*Ekuitas
Awal
Rp1.829.405.304.
862,00*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.829.405.304.862,00 dan Rp1.829.405.304.862,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

*Defisit LO
Rp(72.631.797.46
2,00)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp(72.631.797.462,00) dan Rp(63.604.942.168,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuain Nilai Aset

*Penyesuain Nilai
Aset
Rp0*

Penyesuain Nilai tahun Berjalan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan Penyesuain Nilai persediaan yang disebabkan kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan Metode Penilaian Persediaan “ Harga Perolehan Terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih
Revaluasi aset
Tetap Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	
Gedung bangunan	-
Jumlah	-

*Koreksi Nilai
Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp26.259.338
,00*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap Non Revaluasi untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(26.359.338,00) dan Rp0.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dapat dilihat dibawah ini :

1. Rutan Kefamenanu koreksi nilai aset tetap non revaluasi atas kesalahan penjumlahan pendapatan sewa dibayar dimuka Rp26.359.338,00

E.3.5 Koreksi lain-lain

*Koreksi lain-lain
Rp0*

Koreksi lain-lain untuk 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 8.515.810,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, beban, hibah, piutang, dan utang. Koreksi dilakukan untuk mutasi tambah atau mutasi kurang suatu transaksi karena kesalahan pencatatan transaksi di tahun-tahun sebelumnya. Koreksi utang/piutang maupun pendapatan hasil suatu proses validasi atau penilaian ulang dari Inspektorat Jenderal, BPKP, atau BPK

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar
Entitas Akhir
Rp54.143.740.8
64,00*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing Rp54.143.740.864,00 dan. Rp57.199.810.199,00.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	Rp (112.274.966)
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 56.740.663.667
Transfer Masuk	Rp -
Transfer Keluar	Rp (2.484.647.837)
Pengesahan Hibah Langsung	Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	Rp -
Jumlah	54.143.740.864

Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022, DDEL sebesar Rp(112

274.966,00,00) sedangkan DKEL sebesar Rp56.740.663.667,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp0 Sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp(2.484.647.837,00) transfer keluar dari Bapas Kupang ke satker Kanwil berupa Tanah dan Gedung bangunan ex Bapas Lama.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2022- sebesar Rp0.

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

*Kenaikan/
Penurunan Ekuitas
Rp(18.514.415.936,0
0).*

Kenaikan/Penurunan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(18.0514.415.936,00) dan Rp(6.396.916.159,00).

E.6 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp1.810.890.888.
926,00*

Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.810.890.888.926,00 dan Rp1.867.922.625.257,00.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdapat pada dua Satuan Kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT untuk saat ini diperlukan koordinasi antara satker terkait yaitu, Rutan Bajawa dan Lapas Ende dan Divisi PAS Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT dengan Ditjen PAS terkait kelanjutan KDP Sumur Bor.

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
WILAYAH/PROVINSI : BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR 013052400KD

Waktu Olap: 2022-07-30 05:21:40.0 [B@db6caf4

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 30/07/22 1:06 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_uappaw_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	102,070,000	112,274,966	(10,204,966)	110	17,193,000	268,378,613	(251,185,613)	1561
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	102,070,000	112,274,966	(10,204,966)	110	17,193,000	268,378,613	(251,185,613)	1561
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	61,295,360,000	32,056,538,119	29,238,821,881	52	59,934,292,000	34,551,145,120	25,383,146,880	58
	BELANJA BARANG	56,114,866,000	23,779,266,548	32,335,599,452	42	47,151,336,000	21,630,523,357	25,520,812,643	46
	BELANJA MODAL	1,850,000,000	904,859,000	945,141,000	49	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	119,260,226,000	56,740,663,667	62,519,562,333	48	107,085,628,000	56,181,668,477	50,903,959,523	52
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 05

DITJEN PEMASYARAKATAN

UAPPW : 013052400KD BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR

Tgl. Cetak 30/07/2022 2:00 AM
lap_neraca_uappaw_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	80,708,226	234,329,195	(153,620,969)	(65.56)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(403,541)	(1,171,645)	768,104	(65.56)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	80,304,685	233,157,550	(152,852,865)	(65.56)
Persediaan	3,895,865,503	2,287,551,804	1,608,313,699	70.31
JUMLAH ASET LANCAR	3,976,170,188	2,520,709,354	1,455,460,834	57.74
ASET TETAP				
Tanah	1,708,725,243,000	1,712,637,909,000	(3,912,666,000)	(0.23)
Peralatan dan Mesin	57,553,422,037	51,440,404,741	6,113,017,296	11.88
Gedung dan Bangunan	180,805,963,531	180,209,506,531	596,457,000	0.33
Aset Tetap Lainnya	964,119,099	822,642,003	141,477,096	17.20
Konstruksi Dalam Pengerjaan	741,392,940	749,608,750	(8,215,810)	(1.10)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(122,911,624,521)	(74,799,304,299)	(48,112,320,222)	64.32
JUMLAH ASET TETAP	1,825,878,516,086	1,871,060,766,726	(45,182,250,640)	(2.41)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	8,472,687,814	7,200,830,734	1,271,857,080	17.66
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(8,120,951,919)	(6,347,863,029)	(1,773,088,890)	27.93
JUMLAH ASET LAINNYA	351,735,895	852,967,705	(501,231,810)	(58.76)
JUMLAH ASET	1,830,206,422,169	1,874,434,443,785	(44,228,021,616)	(2.36)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	784,331,938	83,353,964	700,977,974	840.97
Pendapatan Diterima Dimuka	16,785,369	31,548,405	(14,763,036)	(46.79)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	801,117,307	114,902,369	686,214,938	597.22
JUMLAH KEWAJIBAN	801,117,307	114,902,369	686,214,938	597.22
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,829,405,304,862	1,874,319,541,416	(44,914,236,554)	(2.40)
JUMLAH EKUITAS	1,829,405,304,862	1,874,319,541,416	(44,914,236,554)	(2.40)
JUMLAH EKUITAS	1,829,405,304,862	1,874,319,541,416	(44,914,236,554)	(2.40)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,830,206,422,169	1,874,434,443,785	(44,228,021,616)	(2.36)

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 05 **DITJEN PEMASYARAKATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 013052400KD BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR

Kode Lap : LO.WIL
 Tanggal : 30/07/22 1:05 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lo_wilayah --SAKTI
 Tgl Data : 30/7/22 5:23 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	121,487,696	149,249,640	(27,761,944)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	121,487,696	149,249,640	(27,761,944)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	121,487,696	149,249,640	(27,761,944)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	39,773,238,127	34,551,145,120	5,222,093,007	-
Beban Persediaan	2,371,341,946	2,383,703,874	(12,361,928)	-
Beban Barang dan Jasa	19,039,173,899	14,923,682,942	4,115,490,957	-
Beban Pemeliharaan	3,860,179,117	3,584,222,224	275,956,893	-
Beban Perjalanan Dinas	1,535,527,785	1,250,296,270	285,231,515	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	500,000	0	500,000	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : 013052400KD BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR

Kode Lap : LO.WIL
 Tanggal : 30/07/22 1:05 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_wilayah --SAKTI
 Tgl Data : 30/7/22 5:23 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,070,653,674	7,064,063,691	(993,410,017)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(403,541)	(701,201)	297,660	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	72,650,211,007	63,756,412,920	8,893,798,087	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(72,528,723,311)	(63,607,163,280)	(8,921,560,031)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(36,463,855)	1,921,111	(38,384,966)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	1,921,111	(1,921,111)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	36,463,855	0	36,463,855	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(66,610,296)	300,001	(66,910,297)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,302,439,704	300,001	1,302,139,703	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,369,050,000	0	1,369,050,000	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(103,074,151)	2,221,112	(105,295,263)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(72,631,797,462)	(63,604,942,168)	(9,026,855,294)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(72,631,797,462)	(63,604,942,168)	(9,026,855,294)	-

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : 013052400KD BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR

Tgl Data : 30/07/22 5:24 AM
 Kode Lap : LPE.WIL
 Tanggal : 30/07/22 1:06 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lpe_uappaw --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,829,405,304,862	1,874,319,541,416	(44,914,236,554)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(72,631,797,462)	(63,604,942,168)	(9,026,855,294)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(26,359,338)	8,215,810	(34,575,148)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(26,359,338)	0	(26,359,338)	-
LAIN-LAIN	0	8,215,810	(8,215,810)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	54,143,740,864	57,199,810,199	(3,056,069,335)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(18,514,415,936)	(6,396,916,159)	(12,117,499,777)	-
EKUITAS AKHIR	1,810,890,888,926	1,867,922,625,257	(57,031,736,331)	-

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 05

DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : 013052400KD BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR

Tgl Data 30/07/22 5:22 AM

Tgl. Cetak 30/07/2022 1:05 PM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	56,740,663,667
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	112,274,966	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	5,582,600
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	63,906,486
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	25,747,850
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	6,295,481
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	7,852,449
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,890,100
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,840,540,000	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	389,350	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,269,182,762	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	386,017,938	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	476,990,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,586,465,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,633,642	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,325,373,270	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	4,940,300,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	191,980,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	32,828,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,877,531,357	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	10,970,644,714	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	365,676,225	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,163,654	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	553,830,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	276,725,990	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	83,553,213	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,235,796,933	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	74,650,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	566,066,859	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	153,074,795	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,515,725,020	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-	92,576,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	439,926,507	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	104,259,535	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	152,761,930	0
3.0	522141	Belanja Sewa	87,600,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	83,140,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	22,780,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,548,496,749	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,064,814,512	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 05

DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : 013052400KD BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR

Tgl Data 30/07/22 5:22 AM

Tgl. Cetak 30/07/2022 1:05 PM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,248,512,095	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	241,075,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	754,859,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	150,000,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,843
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	2,160,000
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	114,840
JUMLAH			56,855,215,316	56,855,215,316

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 05

DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : 013052400KD BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR

Tgl Data 30/07/22 5:15 AM

Tgl. Cetak 30/07/2022 1:04 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	735,663,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	15,884,169	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	18,355,810	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	6,575,291	0
0.0	115613	Piutang dari Uang Persediaan yang akan Diterima	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,866,283,583	0
0.0	117112	Amunisi	1,046,138,940	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	42,200,000	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	114,840
0.0	131111	Tanah	1,706,838,670,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	58,266,410,537	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	180,518,986,531	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	966,619,099	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	741,392,940	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	46,513,119,147
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	82,387,213,418
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	22,169,991
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	8,296,094,814	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	7,988,055,588
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	7,993,652,858
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	281,933,124
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	13,348,833
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	2,212,223,843
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	300,000,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	751,547,169
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	5,006,977
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	56,740,663,667
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	112,274,966	0
0.0	313211	Transfer Keluar	2,484,647,837	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,829,405,304,862
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	26,359,338	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	5,582,600
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	87,267,146

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 05

DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : 013052400KD BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR

Tgl Data 30/07/22 5:15 AM

Tgl. Cetak 30/07/2022 1:04 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	25,747,850
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	6,295,481
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	72,855,777	0
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	2,890,100
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,369,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	28,301,107,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	520,102	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,631,037,816	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	495,686,074	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	612,260,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,039,875,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	16,005,428	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,712,242,900	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	4,663,347,150	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	270,490,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	32,828,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,895,922,407	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	12,655,425,949	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	380,458,225	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,200,844	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	558,630,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	361,756,330	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	87,907,713	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,267,014,733	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	74,650,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	589,766,859	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	154,574,795	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	433,417,669	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	111,875,255	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	154,682,620	0
3.0	522141	Beban Sewa	87,600,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	83,140,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	22,780,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,550,982,249	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,078,957,812	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,266,452,785	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	269,075,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,066,693,456	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,996,727,404	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	7,232,814	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER JUNI 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 05

DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : 013052400KD BA(013) ES1(05) NUSA TENGGARA TIMUR

Tgl Data 30/07/22 5:15 AM

Tgl. Cetak 30/07/2022 1:04 PM

lap_neraca_percobaan_akruaal_uappaw --SAKTI

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,367,105,546	0
3.0	593112	Beban Persediaan amunisi	550,000	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	230,155,056	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	84,000	0
3.0	593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	500,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	3,287,500	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	398,900	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1,369,050,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	403,541
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	99,370,500	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	36,463,855	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,843
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	2,160,000
JUMLAH			2,036,113,702,878	2,036,113,702,878